

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL DAN WORKSHOP
PERBENIHAN DAN KELEMBAGAAN
Yogyakarta, 10-11 November 2008

Peran Perbenihan Dan Kelembagaan Dalam Memperkokoh Ketahanan Pangan



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FORUM PERBENIHAN KOMDA DIY
2008

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Ucapan Terima Kasih	ii
Sambutan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta	iii
Sambutan Ketua Panitia	v
Daftar Isi	vi

I. Makalah Utama

Peran Perbenihan dan Kelembagaan dalam Memperkokoh Ketahanan Pangan (Menteri Pertanian RI)	1
Peran kelembagaan perbenihan dalam rangka penyediaan dalam rangka penyediaan benih unggul bermutu tepat sasaran (Prpto Yudono)	5
Dari desentralisasi perbenihan membangun industri unit desa menuju terbentuknya desa industri berbasis pertanian industri (Sjamsoe'oed. S)	13
Peran perbenihan dan kelembagaan dalam memperkokoh ketahanan pangan (Atmadi Saleh)	17
Peran perbenihan dan kelembagaan dalam memperkokoh ketahanan pangan (Didi Junaedi)	20

II. Makalah Workshop

Penguatan organisasi dan manajemen petani sebagai pebisnis di pedesaan dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (Soeharto)	1
Peran Perguruan Tinggi dalam perbaikan sistem perbenihan nasional (Sumarwoto dan Ami Suryawati)	13
Membangun sistem perbenihan kedelai dengan pendekatan " Supply Chain Management (Facrul Rozi)	20
Evaluasi kinerja sistem perbenihan (Satrias Ilyas, Memen Surahman, Suwanto, Sri Yani Sujiprihati, Yan Rahman Hidayat, dan Adi Wijono)	32

III. Kelompok Perbenihan

Penggunaan benih bermutu di tingkat petani untuk meningkatkan ketahanan pangan (Antik Suprihanti)	1
Keragaan daya hasil benih varietas unggul baru (VVB) perspektif padi sawah pada area unit perbanyak benih sumber di Jawa Tengah (Hairil Anwar, Ekaningtyas K.H)	7
Pengaruh pupuk daun shell foliar terhadap pertumbuhan dan hasil tiga varietas bawang merah (<i>Allium Ascalonicum</i> ,L) (Darban Haryanto)	13
Peran inovasi teknologi terhadap pengembangan perbenihan kentang di Jawa Timur (PER Prahardini)	18
Pengembangan perbenihan padi di kabupaten batang melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan benih (Qanytah dan Ekaningtyas)	28
Pengaruh dosis minyak cengkeh terhadap vabilitas dan vigor benih jagung pada berbagai investasi hama sitophilus zeamais motsch setelah penyimpanan (Didi Sumadi , Anne Nuraini, Ivan Rendi Mustopo)	34
Keefektifan perendaman benih padi dengan nutrisi rumput laut disertai aplikasi gelombang suara (Study kasus di Kab. Wonosobo) (Yulianto, Sumardi)	41
Produksi benih sebar (ekstension seed) padi merah aek sibundong di gunung kidul (Kristantini, Prajitno, dan Sahono)	47
Pengembangan padi gogo situ bagendit, situ patenggang dan towiti dikawasan hutan sebagai alternatif menciptakan cadangan pangan kawasan hutan (Wahyudi Haryanto, Widarto, Kusahyo Yudi Prayogo)	51
Teknologi penyimpanan benih kacang hijau pendukung ketersediaan benih kacang hijau di Jateng (Qanytah)	56
Alternatif mengurangi terjadinya pengkerakan (crusting) media tanam dalam menghambat perkecambahan benih diatas permukaan tanah untuk mendukung ketahanan pangan (S. Setyo Wardoyo)	65

Pengaruh wadah penyimpanan dan kadar air terhadap kualitas benih jagung dan populasi hama kumbang bubuk (<i>Sitophilus zeamais</i> Motsch) (Wafit Dinarto dan Dian Astriani) 74
Kualitas benih kedelai pada penyimpanan selama tiga bulan dalam berbagai kadar air dan wadah (Dian Astriani & Wafit Dinarto) 81
Kajian konsentrasi GA3 dan perlakuan suhu terhadap pematangan dormansi, pertumbuhan dan hasil bawang merah (<i>Callium ascalonicam</i> L.) (Nurngaini) 91
Pembentukan benih inti padi beras merah varietas Mandel Handayani asal Gunungkidul. (Prajitno, dan Kristantini, Purnomo) 96
Pengaruh umur pindah tanam bibit dan komposisi pupuk organik cair terhadap pertumbuhan dan hasil kubis bunga (<i>Brassica oleracea</i> L.) (Rosana Christiningsih, Astuti Hertiningsih) 101
Vigor dan viabilitas benih kacang hijau (<i>Phaseolus radiatus</i> L.) pada berbagai kondisi ruang simpan dan macam kemasan (Tuti Setyaningrum) 107
Pengaruh waktu penyimpanan benih tiga varietas jagung lokal madura terhadap daya pertumbuhannya. BPTP Jatim (Titiek Purbiati, Soekarno R) 114
Peningkatan produk benih jagung manis (<i>Zea mays saccharota</i>) yang berpotensi kultur embrio dengan berbagai konsentrasi sukrosa (Endah Wahyurini) 121
Penentuan dosis optimum pupuk NPK pada tanaman padi sawah di vetisol kabupaten. Sragen (Padmini, Tohari, Djoko P, Abdul S) 126
Evaluasi karakteristik daya hasil benih padi gogo pada lahan marjinal di kabupaten. Blora Jateng (Hairil Anwar, Subiharta) 133
Pemanfaatan benih berlabel dan penerapan teknologi budidaya padi di tingkat petani (AD Ruskandar, Sri Wahyuni) 138
Perbanyak benih pisang FHIA-17 melalui bonggol (Nina Mulyanti) 146
Evaluasi jenis larutan untuk pematangan dormansi benih padi (Sri Wahyuni) 150

Kajian varietas unggul baru sebagai sumber benih dalam mendukung program ketahanan pangan di kab. Pangkep (Abdul Fattah dan Syamsuddin)	156
Pengaruh kadar air awal dan macam wadah penyimpanan benih kedelai terhadap perkecambahan (Susilowati)	161
Pengaruh umur panen dan dosis pupuk N terhadap hasil dan kualitas benih kedelai (Zamroni dan Astuti Hertiningsih)	167
Kajian peningkatan produktifitas dan mutu hasil padi melalui benih langsung (TABELA) dan tanam pindah (TAPINI) dengan menggunakan umur bibit muda di Wilayah Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Mahargono, Rob M. H. Subowo)	175
Upaya peningkatan produktivitas dengan pemangkasan pucuk pada tiga varietas unggul baru kedelai (Ellen Rosyelina Sasmita dan Siwi Hardiastuti)	182
Kendala benih unggul bersertifikat pada produksi kentang Indonesia (Lagiman)	189
Kajian sistem pengadaan dan distribusi benih kedelai varietas unggul baru melalui jaringan antara benih antara lapang dan musim (JABLSIM) di Sulawesi Selatan (Abdul Fatah dan Syamsudin)	194
Penggunaan kaolin dalam menekan hama <i>Sitophylus Zea mays</i> pada benih jagung simpan (Chimayatus S dan Rahmawati)	202
Teknologi True Potato Seed (TPS) tanaman kentang (Sutardi)	207
Kajian letak biji pada tongkol buah dan media persemai terhadap mutu benih Iles –Iles (<i>Amorphophallus muelleri</i> Blume) (Sumarwoto)	215
Perkembangan teknologi sistem budidaya bawang merah produksi benih True Shallot Seed (TSS) (Sutardi)	222
Kajian kualitas benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar di DIY (Puji Y)	235
Agro industri pedesaan (AIP) koperasi usaha Agribisnis terpadu (KUAT) Subak Guama dalam usaha perbenihan Varietas Unggul Baru (VUB) padi sawah (AANB Kamandalu, Atmajaya)	243

Model bagi hasil pengembangan padi gogo varietas unggul baru di lahan kawasan hutan (Wahyudi H, Kuscahyo, Agus W)	249
Pemanfaatan <i>Methylobacterium</i> spp untuk pematangan dormansi benih padi (<i>Oryza sativa</i> L.) (Eny Widajati dan Selly Salma)	256
Kajian pertumbuhan dan hasil varietas jagung hibrida pada kondisi dosis pupuk kalium yang berbeda (Tutut Wirawati)	264
Kualitas benih dan hasil tanaman bayam merah yang diperlakukan priming dengan NaCl pada berbagai konsentrasi dan lama perendaman (Sri Wuryani dan Mulat D.P)	271
Perkembangan produksi benih padi varietas unggul baru (mekongga, cibogo, sarinah, conde, dan angke) kelas ss di kabupaten sragen (Tota Suhendrata dan Ekaningtyas)	277
Herbisida sebagai desikan sebelum panen untuk benih tanaman kedelai (Abdul Rizal AZ)	281
Inisiasi perbanyak benih kelas SS padi varietas unggul baru (Mekongga, Cibogo, Dan Cigeulis) Di Kelurahan Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang (Ekaningtyas K, Bambang Sudaryanto)	292
Perlakuan benih dengan matricconditioning plus agens hayati untuk pengendalian cendawan dan bakteri <i>seedborne</i> serta peningkatan vigor dan hasil padi (Amiyarsi Mustika Yukti , Satriyas Ilyas dan Sudarsono, Udin S. Nugraha)	297
Pengaruh inokulasi <i>Rhizobium</i> sp dan jarak tanam dengan populasi tetap terhadap kualitas benih kedelai (Rahayu Widowati, Prapto Yudono, A.T. Soejono)	307

IV. Kelompok Kelembagaan

Ketahanan pangan, masalah perbenihan dan kelembagaan (Suwardie)	1
Reposisi petani dalam kemitraan di bidang Agribisnis (Eko Murdiyanto)	8
Meningkatkan peran petani melalui pendampingan dan pendidikan dan penangkaran benih (Basuki)	17

Kajian Agribisnis perbenihan padi varietas unggul baru di tulang bawang BPTP- Lampung (Yulia Pujiharti dan Nina Mulyanti)	22
Peran kelembagaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani untuk menunjang pembangunan pertanian (Budi Widayanto)	31
Potensi petani dalam agribisnis bibit hortikultura (studi kasus pendirian koperasi bibit Mekar Buana) (Seno Basuki dan Endang Iriani)	38
Pengembangan model sistem kelembagaan agribisnis petani kakao di kabupaten Kulon Progo (Budiarto)	46
Memperkuat kelembagaan pangan rumah tangga tani di Kecamatan Tepos kabupaten Gunung Kidul (Indah Widowati)	53
Peran Kelembagaan OPPA di daerah irigasi sumur dalam untuk meningkatkan ketahanan pangan di kabupaten Gunung Kidul DIY (Vandrias Dewantoro)	59
Kajian pengembangan usaha perbenihan ubi jalar di kabupaten Batang dalam upaya mendukung ketahanan pangan (Indrie Ambarsari dan Abdul Choliq)	67
Kerjasama PT. Sang Hyang Seri dengan kelompok tani penangkar dalam memproduksi benih padi (Siti Hamidah)	75
Kontribusi kelembagaan local dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa bagi terwujudnya ketahanan pangan (Tuti Susilowati)	80
Kerjasama kemitraan PT. PERTANI dengan kelompok tani dalam penyediaan bahan baku benih bersertifikat untuk menunjang ketahanan pangan (Wulandari Dwi Etika Rini, Vini Arumsari)	89
Problema ketersediaan dan agribisnis prevenian padi di kabupaten Bantul (Teguh Kismantoroadji)	101
Evaluasi sistem pemanenan padi dalam menunjang perbenihan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Heni Purwaningsih, Mahargono Kobarsih, Rob Musdjisihono)	108
Penggunaan tenaga kerja luar keluarga pada usaha tani tanaman pangan menurut kelembagaan lahan dan tenaga kerja di kabupaten Gunung Kidul (Suwarto)	118

V. Kelompok Lain-lain

Peranan jagung komposit dalam ketahanan pangan dan pendapatan petani (Sularno dan Abdul Cholig)	1
Penerapan teknologi perbenihan padi di pinggiran kota Jakarta (Ikrawati Suwandi, E. Sugiartini, R Indrasti)	8
Model percepatan adopsi padi varietas unggul baru (VUB) di desa Palur kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo (Tota Suhendrata)	15
Strategi pengembangn perbenihan jambu biji merah di kabupaten Banjarnegara (Indrie Ambarsari, Cahyati S,dan Samsul B)	24
Perbaikan kualitas bibit buah naga dengan penggunaan bahan setek dan pupuk pelengkap cair (Heti Herastuti)	31
Kajian ekonomi perbenihan pisang (Wahyunindyawati, F. Kasijadi, PER Prahardini)	36
Tingkat keberhasilan pembuatan benih kelengkeng unggul di kabupaten Temanggung (Endang Iriani, Retno Pangestuti, Seno Basuki)	43
Dampak penyusutan lahan sawah terhadap ketersediaan dan konsumen beras di Kabupaten Sleman (Juarini)	50
Hasil tanaman jahe pada berbagai bobot rimpang dan pupuk kotoran ternak (Supono Budi Sutoto)	55
Peranan giberelin dalam mempertahankan mutu benih jeruk manis (<i>Citrus sinensis</i> L.) yang disimpan dengan perlakuan pendahuluan berbagai konsentrasi ekstrak rimpang jahe (Rati Riyati dan Dwi Yunianto Saputro)	61
Produktivitas tanaman wortel (<i>Daucus Carota</i> L.) mempergunakan benih dengan perlakuan Priming berbagai konsentrasi NaCl dan dosis pupuk kandang sapi (Ami Suryawati dan Retno Suryati)	65
Ketahanan padi varietas unggul baru terhadap penyakit Blas (<i>Magnaporthe gricea</i>) di lahan sawah tadah hujan kabupaten. Pemalang (Yulianto dan Subiharta)	72
Alternatif rekayasa lahan pasir pantai untuk tanaman bawang merah ditinjau dari sifat lengas tanahnya (A.Z Purnomo Budi Santosa)	79

Kajian perbenihan jagung komposit di Lampung (Dewi Rumbania Mustikawati)	87
Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Berbasis Agroindustri Pangan Lokal (Suatu Kajian Agroindustri Gula Kelapa Kristal Di Kecamatan KokapKabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Siti Syamsiar	95

REPOSISI PETANI DALAM KEMITRAAN AGRIBISNIS

FARMER'S REPOSITIONING IN AGRIBUSINESS PARTNERSHIPS

Eko Murdiyanto, MSi

Jurusan Agribisnis UPN "Veteran" Yogyakarta

ABSTRACT

Nowdays, Agribusiness development in Indonesia are carried out using partnership model between agribusiness companies and farmer or farmer's groups. The actual partnerships occur in several divisions, starting from seeding to the technology development.

From the agribusiness company side, this partnership model is expected to give profit and smoothing the production process. In this position, the company will get the expected outcome, relatively. Eith its stable organization and established management, it will be able to run the partnerships for the company's interest.

However, the same condition could not be felt by the farmer or farmer's group. It caused by their unstable organization and poorly established management, so the benefits from the partnerships that they should receive are not that optimal. Relationships between the two tend to become a rational instrumental action with main orientation on economical benefit, and it is not on the actual pathnership which tendencies are on the equality between the company and farmer or farmer's group. Therefore, the institutional strengthening effort in farmer or farmer's group level is needed so they can have the bargaining position which wqual to the agribusiness company.

Key Words: Partnership, rational instrumental, reposition

PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan pertanian nasional saat ini lebih berorientasi pada pembangunan sistem agribisnis. Agribisnis diharapkan dapat menjadi lokomotif dalam pembangunan, terutama pembangunan ekonomi secara nasional. Pengembangan agribisnis diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan antara penciptaan sarana dan prasarana pendukung, produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran hasil pertanian.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam mendorong berkembangnya agribisnis secara meluas adalah dengan membangun kerjasama antara pelaku dalam skala kecil, skala menengah dan skala besar. Lebih fokus lagi, pemerintah berusaha mendorong kerjasama antara petani sebagai pemilik modal sosial atau kelompok tani dengan perusahaan agribisnis sebagai pemilik modal ekonomi. Usaha ini dilakukan mengingat sebagian besar petani di Indonesia adalah petani kecil dengan usahatani kecil yang menghasilkan produksi dan pendapatan rendah, meskipun tidak selalu produktivitasnya rendah. Kecilnya usahatani ini dapat dilihat dari jumlah petani gurem (kurang dari 0,5 Ha) yang meliputi 50% dari rumah tangga pertanian. Sehingga tidak mengherankan bahwa kehidupan petani sangat dekat dengan batas subsistensi yang dicirikan dengan sikap mendahulukan selamat (*savety first*). Sifat mendahulukan selamat ini menyebabkan perilaku enggan terhadap risiko berproduksi yang sangat mempengaruhi perilaku petani dalam pengambilan keputusan.

Menurut Scott (1983), adanya perilaku enggan terhadap risiko di dalam pengambilan keputusan disebabkan oleh dilema ekonomi sentral yang dihadapi oleh kebanyakan rumahtangga petani. Dimana petani lebih dekat kepada batas subsistensi dan selalu mengakui ketidakpastian cuaca dan tuntutan-tuntutan pihak luar menyebabkan rumahtangga petani tidak banyak peluang untuk menerapkan perhitungan keuntungan maksimal dalam berusahatani. Sifat khas pada diri petani adalah berusaha menghindari kegagalan dan bukannya berusaha memperoleh keuntungan besar dengan mengambil

risiko. Petani lebih mendahulukan selamat (*safety first*) dalam berusahatani daripada berusaha memperoleh keuntungan yang besar.

Lebih lanjut menurut Scott, prinsip resiprositas berdasarkan gagasan yang sederhana saja, yakni bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantunya atau setidaknya jangan merugikannya. Lebih khusus lagi, prinsip ini mengandung arti bahwa satu hadiah atau jasa yang diterima menciptakan, bagi si penerima, satu kewajiban timbal balik untuk membalas hadiah atau jasa dengan nilai yang setidaknya-tidaknya sebanding di kemudian hari. Dalam konteks ini prinsip resiprositas berfungsi sebagai landasan bagi struktur persahabatan dan persekutuan dalam masyarakat-masyarakat tradisional.

Petani atau kelompok tani selain memiliki modal sosial juga dalam dirinya sebagai pemilik yang sah dari lahan dan tenaga kerja yang merupakan modal utama dalam kegiatan agribisnis. Namun dalam pengembangan usahanya petani atau kelompok tani dihadapkan pada kendala ketersediaan modal yang relatif terbatas. Di sisi yang lain, perusahaan sebagai pemilik modal ekonomi, tidak memiliki lahan yang luas dan tenaga kerja untuk melakukan proses produksi dalam agribisnis. Untuk mengatasi kendala dari kedua belah pihak tersebut maka pemerintah mendorong terjalinnya kerjasama yang menyatukan modal ekonomi dan modal sosial untuk kepentingan bersama.

Kerjasama antara petani atau kelompok tani dengan perusahaan agribisnis yang mengandalkan kesetaraan diharapkan dapat mengatasi ketimpangan hubungan antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini diharapkan terjadi hubungan yang bersifat simbiosis atau sinergi antara modal ekonomi dengan modal dengan sosial. Hal ini diakibatkan karena kedua belah pihak memberi korbanan untuk mendapatkan manfaat atau risiko yang setimpal.

Tulisan ini bertitik tolak dari semakin maraknya kemitraan antara petani atau kelompok tani dengan perusahaan agribisnis, baik agribisnis perbenihan maupun produksi. Sehingga perlu dipertanyakan kembali apakah hubungan-hubungan tersebut merupakan hubungan kesaling-tergantungan sosial-ekonomi yang bersifat simetris atau asimetris? Apakah sudah terjadi kesetaraan antara perusahaan agribisnis dengan petani atau kelompok tani yang bermitra? Apa yang harus dipersiapkan oleh petani atau kelompok tani agar kerjasama yang terjalin dapat sejajar saling menguntungkan?

MEMBANGUN KEMANDIRIAN MELALUI KEMITRAAN

Kerjasama sebagai produk interaksi sosial dalam masyarakat merupakan potensi sosial yang dimiliki bangsa Indonesia. Kerjasama dapat diartikan sebagai usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama dapat berkembang apabila orang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan tersebut dikemudian hari dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Menurut Soekanto (2000), Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.

Dalam teori-teori Sosiologi dapat dijumpai beberapa bentuk kerjasama yang biasa diberi nama kerjasama (*cooperation*). Kerjasama dibedakan menjadi 3, yaitu (Soekanto, 2000):

1. Kerjasama spontan (*spontaneous cooperation*), yaitu kerjasama yang terjadi serta merta, tanpa melalui perencanaan terlebih dahulu atau terjadi secara spontan.
2. Kerjasama kontrak (*Contractual cooperation*), yaitu kerjasama yang merupakan hasil dari perintah atasan atau penguasa dan merupakan kerjasama atas dasar tertentu.
3. Kerjasama tradisional (*Traditional cooperation*), yaitu bentuk kerjasama sebagai bagian atau unsur dari sistem sosial.

Selain itu menurut pelaksanaannya, kerjasama dibedakan menjadi lima (5) bentuk, yaitu:

1. kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong
2. *bargainning*, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih
3. Ko-optasi (*cooptation*), yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan.
4. Koalisi (*coalition*), yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama
5. *Joint-ventura*, yaitu kerjasama dalam proyek-proyek tertentu.

Dewasa ini kerjasama lebih cenderung kepada kemitraan, yaitu suatu kerjasama yang memiliki sifat khas dari kerjasama tersebut. Dalam kemitraan kegiatan agribisnis di Indonesia dikenal tiga pola, yaitu:

1. Kemitraan Agribisnis Tradisional, yang mengikuti pola hubungan *patron-client*. Dalam kerjasama ini pelaku ekonomi yang berperan sebagai *patron* adalah para pemilik modal atau peralatan produksi yang strategis, sedangkan yang berperan sebagai *client* adalah petani penggarap. Pada pola ini kemitraan yang berkembang lebih bersifat horisontal, yaitu kemitraan yang bergerak di bidang produksi atau usahatani. Meskipun demikian juga berkembang kemitraan yang bersifat vertikal yang diwarnai oleh ubungan hutang (panjar atau ijon) antara pedagang (pemberi hutang) dengan petani produsen (penerima hutang). *Patron-Client* bersifat sangat asimetris dan secara terselubung terjadi eksploitasi berkelanjutan dari yang kuat (*patron*) terhadap yang lemah (*client*). Pola ini sangat nyaman untuk pelaku-pelaku ekonomi yang meemntingkan rasa aman, tetapi kurang merangsang bagi tumbuhnya semangat mandiri. Oleh karena itu pola ini sering dituding sebagai salah satu biang keladi berkembangnya kemiskinan di Perdesaan.
2. Pola kemitraan Program Pemerintah, condong pada pengembangan kemitraan secara vertikal dengan model yang dianut adalah hubungan bapak-anak angkat yang pada perkembangan agribisnis dikenal sebagai pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Pola kemitraan ini maiz diwarnai dengan interdependensi yang bersifat asimetris antara yang kuat atau pemilik modal (bapak angkat) dengan yang lemah atau petanuu pekerja (anak angkat). Dilihat dari kemampuan mengadopsi innovais di bidang Iptek, permodalan dan kelembagaan ekonomi mutaklhir, pola kemitraan ini sedikit lebih maju dibanding *Patron-Client*. Mengingat begitu kuatnya posisi tukar sang bapak angkat, pola ini memberi peluang terjadinya eksploitasi legal dari bapak angkat terhadap anak angkatnya.
3. Pola Kemitraan Pasar berkembang, timbul sebagai akibat dari masuknya peradaban ekonomi pasar dalam usaha pertanian di perdesaan. Jenis usa yang dibidik oleh pola ini hadala usa yang bernilai ekonomi tinggi dan mempunyai permintaan kyat di pasar dunia. Pola kemitraan berkembang dengan melibatkan petani sebagai pemilik aset tenaga kerja dan peralatan produksi, dan pemilik modal besar yang bergerak di bidang industri pengolah dan pemasar hasil. Dua pelaku ekonomi, petani dan pemilik modal menggalang kerjasama (kemitraan) karena adanya kepentingan (*mutually benefica*) untuk berbagai manfaat ekonomi. Dari segi pengadopsian atas hasil inovasi di bidang iptek permodalan dan kelembagaan ekonomi modern pola ini mempunyai keandalan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pola kemitraan *Patron-Client* dan pola kemitraan program pemerintah.
4. Pola kemitraan diatas apabila dicermati lebih jauh menunjuk pada statu kondisi dimana kedua belah pihak saling diuntungkan. Bagi pihak yang kuat dengan adanya kemitraan akan meningkatkan manfaat ekonomi, sedngkan bagi yang lemah selain terjadi peningkatan ekonomi yang terpenting hadala tercapainya kemandirian. Inilah hakekat kemitraan yang sesungguhnya, dimana yang kuat menolong yang lemah tanpa merugikan yang kuat.

KERJASAMA PRODUKSI DALAM AGRIBISNIS : BEBERAPA KASUS

Hasil penelitian Pusat Kajian Agraria Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor dan PT Sang Hyang Seri (Persero) atau SHS Jakarta tentang kemitraan di PT SHS Sukamandi memberikan gambaran hubungan kemitraan antara perusahaan agribisnis dengan petani atau kelompok tani. Dalam pelaksanaannya SHS yang bergerak dalam bidang agribisnis hulu sampai hilir melakukan beberapa kegiatan, yaitu:

1. kegiatan dan perdagangan industri hulu dalam rangka menghasilkan dan menjual sarana produksi berupa benih padi (benih sebar) yang dipasarkan kepada petani.
2. Kegiatan industri pengolahan komoditas padi bakal benih menjadi komoditas benih sebar bersertifikat kemudian dipasarkan kepada petani konsumen.

Pola kerjasama yang dilakukan amenganut pola kerjasama pengelolaan produksi (KSP). Pola ini memberikan peluang petani naik status dari buruh tani lokal menjadi petani peserta kerjasama dengan status *penyakap maro*. Pola KSP sebenarnya merupakan formalisasi pola-pola hubungan produksi yang lazim berlaku secara informal dalam masyarakat. Wujud formalitas tersebut adalah surat perjanjian kerjasama yang menunjuk pada pembentukan hubungan produksi kontakual antara SHS dan petani lokal.

Pada pola KSP hubungan kontraktual bersifat kolektif, artinya bukan petani *penyakap maro* melainkan kelompok tani yang memegang surat kontrak kerjasama dengan SHS. Surat kontrak dalam kerjasama ini hanya ditandatangani oleh ketua kelompok tani, sedangkan anggota kelompok tani hanya membubuhkan tanda tangan pada daftar petani yang dilampirkan pada surat kerjasama tersebut.

Substansi isi perjanjian tersebut pada prinsipnya didasarkan pada norma-norma hubungan produksi pertanian yang lazim berlaku di lingkungan komunitas lokal yaitu pola *penyakap maro*. Perjanjian tersebut meskipun merupakan hasil penetapan sepihak SHS (demikian juga halnya dengan perjanjian-perjanjian antara perusahaan agribisnis lain dengan kelompok tani pada umumnya di Indonesia), namun cenderung dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Beberapa hal yang terjadi di lapangan ternyata tidak selalu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada pasal mengenai risiko dan manfaat usahatani yang terbagikan antara SHS dengan petani *penyakap maro*, kenyataannya menunjukkan pembagian yang berbeda, bahkan merupakan suatu ketimpangan yang mencolok. Pihak SHS ternyata menanggung beban risiko yang lebih kecil (biaya produksi Rp 1,12 juta per hektar), tetapi menerima manfaat yang lebih besar (penerimaan bersih Rp 1,76 juta per hektar) atau dengan BC rasio sebesar 1,56. Sebaliknya petani menanggung beban risiko yang lebih besar (biaya produksi Rp 12,13 juta per hektar), tetapi menerima manfaat yang lebih besar (penerimaan bersih Rp 0,74 juta per hektar) atau dengan BC rasio hanya 0,35. Perkiraan ini didasarkan pada asumsi bahwa proses produksi berlangsung normal. Jika produksi gagal (terkena serangan hama atau penyakit) sebenarnya tidak mencerminkan pembagian risiko secara adil. Dalam konteks ini berbagi risiko sebenarnya merupakan pengalihan sebagian besar risiko (hampir dua per tiganya) kepada petani *penyakap maro*.

Hal lain yang muncul adalah dominasi kekuasaan dalam struktur kerjasama tersebut. SHS selalu berada pada pihak yang menjatuhkan sanksi kepada petani yang melanggar norma, sementara petani tidak dapat melakukan hal serupa kepada perusahaan. Jika petani KSP tidak mengayak gabahnya, maka dapat dikenai sanksi pencoretan namanya dari daftar petani penggarapa untuk musim berikutnya. Tetapi jika SHS terlambat membayar petani sampai dua minggu dari ketentuan, maka petani tidak dapat menjatuhkan sanksi apapun terhadap SHS, kecuali hanya mengajukan keluhan atau

ketidakpuasan saja. Bahkan seorang petani mengistilahkan pegawai SHS dengan ungkapan *nitah wae, mere rokok hanteu* (main perintah saja, padahal tidak memberi sebatang rokokpun).

Penelitian Novariani (2008) pada kemitraan antara PT Sang Hyang Seri (Persero) Unit Bisnis Daerah (UBD) Klaten dengan kelompok tani penangkar benih padi Ciherang tidaklah berbeda jauh. Perjanjian yang dilakukan secara tertulis mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut hak dan kewajiban kedua pihak. Kerjasama kedua belah pihak disimpulkan belum efektif karena ada beberapa hal yang belum dilaksanakan oleh salah satu pihak. Dalam hal pembelian hasil panen (GKP) yang sudah memenuhi standar perusahaan hanya 76,1% yang seharusnya 100%. Hal ini melanggar perjanjian pasal (4), yang menyebutkan bahwa gabah kering panen yang memenuhi standar perusahaan akan dibeli seluruhnya oleh perusahaan.

Kondisi ini dapat terjadi karena UBD Klaten tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli GKP petani, karena dana yang digunakan UBD Klaten berasal dari PT SHS Regional Manajer (RM) Malang dan kebijakan pendanaan dikendalikan oleh Malang. Hal ini menunjukkan bahwa muncul dominasi kekuasaan dalam struktur kerjasama antara PT Sang Hyang Seri (Persero) Unit Bisnis Daerah (UBD) Klaten dengan kelompok tani penangkar benih padi Ciherang. Dalam hal ini PT SHS UBD Klaten lebih mendominasi daripada kelompok tani penangkar benih.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi (2006) antara Peternak Burung Puyuh dengan PT Peksi Guna Raharja juga menunjukkan kondisi yang tidak berbeda. Peternak sudah tepat waktu meyetorkan telur puyuh, namun harga dibawah harga pasar Rp 95,00 yang hanya dibeli Rp 90,00 per butir. Hal ini terjadi karena tidak ada dalam perjanjian mengenai harga telur puyuh terkait dengan harga pasar.

Hal lain yang dilanggar adalah pada Pasal 2 (4) yaitu petani akan mendapat mendapat imbalan berupa fee telur Rp 1,00 per butir dan subsidi pakan 500 per zak apabila omzet sudah mencapai 75.000 butir per minggu atau bagi yang benar-benar berprestasi menurut penilaian PT. Persyaratan benar-benar berprestasi menurut penilaian PT diatas menunjukkan dominasi PT Peksi Guna Raharja terhadap peternak.

Anjarworo (2006) yang meneliti kerjasama antara Kelompok tani Mekaring Pambudi dengan PT Sentosa Esa Swadaya juga menunjukkan kondisi yang tidak berbeda. Kerjasama dalam bidang usahatani buncis Perancis ini diumulai dari perbenihan sampai pada pemasaran. Perusahaan memiliki fungsi perencanaan, pembinaan teknis, penyediaan sarana produksi dan memasarkan hasil produksi. Selain itu perusahaan juga memberikan pinjaman pada kelompok tani berupa sarana produksi, mulai dari benih, pupuk, insektisida sampai pada mulsa palstik hitam perak.

Dalam konteks ini perusahaan dan kelompok tani menjalankan kemitraan dalam kesejajaran. Namun dalam penentuan standar hasil panen dan harga lebih banyak ditentukan oleh perusahaan daripada kesejajaran antara perusahaan dengan kelompok tani. Penentuan harga panen lebih condong ditentukan oleh perusahaan dan hanya memperoleh persetujuan dari petani. Dalam hal ini petani hanya dapat memberikan masukan tetapi tidak ikut menentukan penentuan harga buncis.

Keempat kasus diatas menunjukkan hubungan kerjasama produksi yang asimetris antara perusahaan agribisnis dengan petani atau kelompok tani, Namun juga tidak menunjuk pada struktur patronase atau hubungan patron-klien. Pihak perusahaan agribisnis bukanlah patron yang menjalankan fungsi perlindungan, dan petani juga bukanlah klien yang mengabdikan pada perusahaan. Namun hubungan antara perusahaan agribisnis dengan petani atau kelompok tani merupakan suatu simbiosis atau sinergi antara modal ekonomi (dimiliki oleh perusahaan agribisnis, yang sering disebut sebagai *si kuat*) dengan modal sosial (dimiliki oleh petani atau kelompok tani, yang sering disebut sebagai *si lemah*) dengan hegemoni modal ekonomi atas modal sosial. Simbiosis disini dimaknai bahwa kedua belah pihak memberi korbanan untuk mendapatkan manfaat atau risiko yang setimpal.

Kurang seimbangnya pelaksanaan kemitraan dalam beberapa kasus diatas lebih banyak disebabkan karena petani atau kelompok tani kurang memahami isi perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan perusahaan sebagai perancangnya. Ketimpangan hubungan kemitraan antara kedua belah pihak dapat berubah menjadi eksploitasi terselubung yang tidak dirasakan oleh petani atau kelompok tani sebagai pihak yang dieksplotasi maupun dari perusahaan sebagai pihak yang mengeksploitasi.

Oleh karena itu hubungan kerjasama antara perusahaan agribisnis dengan petani atau kelompok tani (dan bentuk kerjasama di Indonesia pada umumnya) belum dapat dikatakan sebagai kemitraan, karena kemitraan mengandalkan kesetaraan antara perusahaan agribisnis dengan petani atau kelompok tani. Keterlibatan kedua belah pihak dalam kerjasama tersebut lebih merupakan tindakan *rasional instrumental*, yaitu suatu tindakan yang didasarkan pada instrumen rasional yang dapat dijangkau oleh petani atau kelompok tani. Dengan orientasi utama adalah manfaat ekonomi, meskipun risiko dan manfaat ekonomi yang diperoleh tidak sebanding atau setara. Hal yang penting bagi petani atau kelompok tani adalah bahwa dirinya mendapatkan pendapatan yang lebih baik dengan mengikuti kerjasama tersebut.

Namun demikian proses kemitraan yang terjadi sedikit banyak menuju gejala "*revolusi manajemen*" dalam kegiatan pertanian bagi petani atau kelompok tani. Proses revolusi tersebut berjalan dari *manajemen pertanian tradisional* menuju *manajemen agribisnis*. Gejala ini merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Revolusi ini akan berjalan dengan baik apabila perbedaan manajemen antara perusahaan agribisnis dengan petani atau kelompok tani tidak terlalu jauh kesenjangannya.

PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI SEBAGAI LANGKAH AWAL

Dalam kemitraan tantangan terbesar adalah membangun dan mempertahankan kesejajaran para pelaku. Sebagai suatu bentuk gejala "*revolusi manajemen*" dari *manajemen pertanian tradisional* menuju *manajemen agribisnis* maka perlu diperhatikan kesejajaran tingkat manajemen kedua belah pihak, yaitu perusahaan agribisnis dan petani atau kelompok tani.

Dari sisi perusahaan agribisnis tidak disangsikan lagi bahwa aspek organisasi dan manajemen telah stabil atau mengalami kemapanan. Oleh karena itu dari perusahaan agribisnis yang perlu mendapat perhatian adalah aspek kesejajaran itu sendiri. Dari sisi petani atau kelompok tani perlu mensejajarkan diri dalam bidang organisasi dan manajemen dengan perusahaan agribisnis.

Kelemahan yang masih dimiliki oleh kelompok tani sebagai lembaga di tingkat petani adalah masih kentalnya budaya sosial dibandingkan budaya ekonomi dalam pengelolaan organisasi. Akibatnya dalam pengelolaan organisasi tidak ditemui adanya ciri-ciri organisasi modern dan cenderung masih memiliki ciri sebagai organisasi tradisional. Salah satu ciri yang menonjol dalam kelompok tani adalah tidak adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bagi kelompok tani.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diperlukan bagi kelompok tani untuk menjamin keberlangsungan kelompok tani itu sendiri. Segala hal yang terkait dengan hak, kewajiban, kegiatan, penerapan sanksi dan balas jasa dan segala aturan yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan diatur dalam AD/ART tersebut. Selain itu keberadaan AD/ART bagi kelompok tani memberi makna bahwa kelompok tani yang bersangkutan merupakan perkumpulan yang legal dari segi hukum positif.

Legalitas kelompok tani di mata hukum ini akan memberikan keuntungan bagi kelompok tani bahwa kedudukannya sejajar dengan perusahaan agribisnis dimata hukum. Kondisi ini akan menguntungkan tidak saja bagi kelompok tani tapi juga bagi perusahaan agribisnis, artinya kelompok tani dan perusahaan agribisnis akan sama-sama mendapatkan keuntungan dengan kedudukan yang sejajar di mata hukum sebagai lembaga yang legal formal.

Dari sisi manajemen, kelompok tani juga masih menggunakan manajemen tradisional sebagai kelompok yang mengandalkan modal sosial dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan interaksi dalam kelompok tani. Modal sosial merupakan serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka (Fukuyama, 2002). Modal sosial yang dimiliki petani atau kelompok tani adalah kepercayaan (*trust*) dan timbal balik (*reciprocal*).

Kepercayaan merupakan pelumas yang membuat jalannya kelompok atau organisasi menjadi lebih efisien dan dapat mendorong seseorang bersedia menggunakan hasil kerja orang lain serta mendorong munculnya aktivitas yang produktif atau menguntungkan. Sedangkan hubungan timbal balik diwujudkan dalam bentuk saling memberi, saling menerima dan saling membantu yang dapat muncul dalam proses sosial. Berdasarkan keduanya maka dalam hubungan antar anggota dalam kelompok tani interaksi sosial menjadi unsur utama yang mendorong munculnya modal sosial. Salah satu produk dari digunakannya modal sosial dalam menggerakkan roda kelompok adalah munculnya sistem manajemen yang berbasis modal sosial atau sering disebut sebagai manajemen pertanian tradisional.

Melihat kondisi kelompok tani yang masih mengandalkan modal sosial sebagai roda penggerak kelompok maka tidak salah kiranya diperlukan satu keberanian untuk melakukan perubahan bagi petani dan kelompok tani dalam organisasi dan manajemen, sehingga sejajar dengan perusahaan agribisnis. Dengan kata lain diperlukan perubahan dari *manajemen pertanian tradisional* menuju *manajemen agribisnis*. Proses perubahan tersebut merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Strategi ini akan berjalan dengan baik apabila perbedaan manajemen antara perusahaan agribisnis dengan kelompok tani tidak terlalu jauh kesenjangan atau bahkan sejajar dalam organisasi dan manajemen.

Dengan kesejajaran dalam organisasi dan manajemen ini diharapkan kedudukan petani atau kelompok tani dan perusahaan agribisnis akan mengalami perubahan posisi dari sekedar obyek kemitraan menjadi subyek dalam kemitraan. Dengan demikian diharapkan hubungan yang asimetris dalam kemitraan akan berubah menjadi simetris, saling kesejajaran. Dalam konteks inilah diperlukan reposisi petani atau kelompok tani dalam kemitraan.

Upaya reposisi merupakan transformasi peran yang menuntut kemampuan, cara kerja, cara berpikir dan peran baru sumberdaya manusia yang ada. Proses reposisi dapat dilakukan melalui aspek kompetensi sumberdaya manusia dan aspek perilaku. Reposisi kompetensi sumberdaya manusia berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sedangkan reposisi aspek perilaku sumberdaya manusia berkaitan dengan peningkatan inisiatif dan etos kerja, baik di tingkat petani maupun kelompok tani

Dari aspek perilaku, reposisi bisa dilakukan dengan strategi pemberdayaan (*empowerment*) bagi petani dan kelompok tani. Pemberdayaan merupakan pemberian tanggungjawab dan wewenang untuk mengambil keputusan. Pemberdayaan yang dimaksud disini yaitu *pertama*, petani diberi tanggungjawab dan wewenang untuk mengambil keputusan; *kedua* menciptakan kondisi saling percaya antara petani atau kelompok tani dengan perusahaan agribisnis, pelaku agribisnis dan pemerintah; *ketiga* melibatkan petani atau kelompok tani dalam pengambilan keputusan. Jadi petani atau kelompok tani bukan merupakan obyek tetapi justru petani atau kelompok tani merupakan subyek dalam kemitraan.

Reposisi kompetensi sumberdaya manusia berkaitan dengan kemampuan teknis konseptual, dan hubungan manusiawi. Kompetensi sumberdaya manusia menekankan pada inovasi, kewirausahaan, dan keterlibatan positif dalam pengambilan keputusan. Didalam kemitraan agribisnis pada dasarnya ada 2 (dua) pilar yang merupakan subyek yaitu perusahaan agribisnis dan petani atau kelompok tani. Perusahaan agribisnis memiliki modal ekonomi dan petani atau kelompok tani

memiliki modal sosial. Modal ekonomi meliputi kemampuan manajemen agribisnis modern, teknologi budidaya, dan kemampuan finansial. Sedangkan modal sosial yang dimiliki petani atau kelompok tani yaitu institusi-institusi hubungan produksi pertanian yang bersifat *informal-rasional*. Modal alami berupa modal lahan sebagian besar dimiliki oleh petani atau kelompok tani.

Pemberdayaan petani dan kelompok tani dibangun melalui program yang menghargai adanya kebebasan berpendapat guna memotivasi petani agar mampu mengelola usahatani secara optimal. Dalam pemberdayaan ini petani akan merasa terlibat secara personal dan merasa memperoleh pengakuan atas eksistensi dirinya yang berdampak pada peningkatan harga diri sebagai manusia. Penerapan pemberdayaan akan menimbulkan rasa percaya diri dan mereka akan bekerja secara efektif dan efisien.

PENUTUP

Kemitraan antara perusahaan agribisnis dengan petani atau kelompok tani dalam pengembangan agribisnis di Indonesia terjadi dalam beberapa bidang mulai perbenihan, produksi sampai pada pengembangan teknologi. Namun dalam pelaksanaannya karakter *si lemah* dan *si kuat* masih mendominasi dalam hubungan kerjasama tersebut. Dari sisi perusahaan agribisnis sebagai *si kuat*, model kemitraan ini dapat memberikan keuntungan dan proses produksi yang semakin lancar. Kondisi ini tercipta karena perusahaan agribisnis telah memiliki tatanan organisasi dan manajemen yang mapan, sehingga kerjasama dengan *si lemah* akan semakin memperkuat *si kuat*.

Dari sisi petani atau kelompok tani sebagai *si lemah*, model kemitraan ini dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan adanya perubahan manajemen kearah manajemen agribisnis yang dibawa perusahaan mitra. Meskipun demikian masih terdapat kurang seimbangya pelaksanaan kemitraan karena petani atau kelompok tani kurang memahami isi perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak. Ketimpangan hubungan kemitraan antara kedua belah pihak dapat berubah menjadi eksploitasi terselubung yang tidak dirasakan oleh petani atau kelompok tani sebagai pihak yang dieksploitasi maupun dari perusahaan sebagai pihak yang mengeksploitasi.

Hal ini disebabkan karena petani atau kelompok tani belum memiliki tatanan organisasi dan manajemen yang mapan, sehingga manfaat yang diperoleh dengan kemitraan belumlah optimal. Hubungan yang terjadi lebih cenderung merupakan tindakan *rasional instrumental* dengan orientasi utama manfaat ekonomi, dan bukannya kemitraan yang mengandalkan kesetaraan antara perusahaan agribisnis dengan petani atau kelompok tani. Oleh karena itu penguatan kelembagaan di tingkat petani atau kelompok tani sangat diperlukan sebagai langkah awal. Petani atau kelompok tani perlu segera mereposisi dirinya agar memiliki posisi tawar yang sama dengan perusahaan agribisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik. 2002. Statistik Indonesia 2002. Biro Pusat Statistik. Jakarta.
- Cahyadi. 2006. Efektivitas Kemitraan antara Peternak Burung Puyuh dengan PT Peksi Guna Raharja di Kecamatan , Kabupaten Klaten. Skripsi S-1. Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Fukuyama, 2002Kusnoto. Hendra. 2001. The World's Best Management Practices. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Novariani, Intan Eka. 2008. Efektivitas Kerjasama PT SHS (Persero) UBD Klaten dengan Kelompok Tani Penagkar benih Padi Ciherang di desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Skripsi S-1. Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Saragih, Bungaran. 2001. Suara dari Bogor (Membangun Sistem Agribisnis). Yayasan ESES. Jakarta.
- Scott, JC. 1983. Moral Ekonomi Petani. LP3ES. Jakarta
- Sitorus Felix MT dkk. 2001. Agribisnis Berbasis Komunitas. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor.

- Soekanto, Soerjono. 2000. Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo. Jakarta.
- Soetjipto Budi W dkk. 2002. Paradigma Baru Manajemen Sumberdaya Manusia. Amara Books. Jogjakarta.
- Soekartawi. 1991. Agribisnis, Teori dan Aplikasinya. Universitas Brawijaya, Rajawali Pres. Jakarta.